

Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Pt Sukun Druck Kabupaten Kudus

Muhammad Firdaus Nur Ali, Suharma, Helly Ocktilia

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Implementation, BPJS
Employment Program, Work
Accident Insurance.

Corresponding Author:

Muhammad Firdaus Nur Ali
Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung
Muhammadfirdausnurali@g
mail.com

Abstract: *Implementation refers to the Implementation process in achieving the goals that have been set. This study aims to find out how the implementation of the Social Security Agency for Employment Social Security (BPJS Ketenagakerjaan) specifically regarding Work Accident Insurance at PT Sukun Druck, Kudus Regency. This research uses descriptive qualitative methods, using interview, observation, and documentation techniques. The data sources in this study are primary data sources from 7 informants and secondary data sources in the form of documentation or other information. The research results show that the implementation of the work accident insurance program at PT. The Sukun Druck Kudus Regency in terms of resources, bureaucratic structure and disposition has been implemented well in accordance with the SOP, while in the communication aspect it has not been implemented well because employees do not yet know about the social security they receive. Based on the analysis of research results, the program proposed by researchers is "Socialization of the Work Accident Insurance Program". This program is expected to help increase employee understanding regarding the Work Accident Insurance Program as the social security they receive.*

Abstrak: *Implementasi merujuk pada proses pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) khususnya mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Sukun Druck Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer berasal dari 7 informan dan sumber data sekunder berupa dokumentasi atau informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan kecelakaan kerja di PT. Sukun Druck Kabupaten Kudus dalam aspek sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP, sedangkan dalam aspek komunikasi masih kurang terlaksana dengan baik karena pegawai belum mengetahui terkait jaminan sosial yang mereka dapat. Berdasarkan Analisa hasil penelitian, program yang diusulkan peneliti yaitu "Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja" program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman pegawai terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai jaminan sosial yang mereka dapat.*

PENDAHULUAN

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja guna memberikan jaminan finansial apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja. Program ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja dengan memberikan kompensasi atas berbagai risiko yang mungkin terjadi selama mereka bekerja, baik berupa kecelakaan ringan, kecelakaan berat, hingga kematian akibat kecelakaan kerja. Dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berfungsi untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja di berbagai sektor.

PT Sukun Druck Kabupaten Kudus merupakan salah satu perusahaan yang telah mengimplementasikan program JKK dengan mendaftarkan seluruh pegawainya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai perusahaan percetakan yang memiliki banyak pekerja, penerapan program JKK di PT Sukun Druck menjadi tantangan tersendiri. Berbagai faktor seperti sosialisasi, komunikasi, proses klaim, dan kepatuhan dalam pembayaran iuran menjadi aspek yang menentukan efektivitas implementasi program ini.

Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Bagi pekerja, kecelakaan dapat menyebabkan hilangnya pendapatan sementara atau bahkan permanen jika pekerja mengalami cacat tetap yang menghalangi mereka untuk kembali bekerja. Sementara bagi perusahaan, kecelakaan kerja dapat berdampak pada meningkatnya biaya operasional, baik dalam bentuk biaya perawatan medis bagi pekerja yang terluka, pembayaran santunan, maupun potensi penurunan produktivitas akibat berkurangnya tenaga kerja. Oleh karena itu, implementasi program JKK yang baik menjadi sangat penting dalam memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program JKK adalah kurangnya pemahaman pekerja terhadap manfaat dan prosedur yang harus mereka lalui ketika mengajukan klaim. Banyak pekerja yang masih belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam program ini. Kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan maupun BPJS Ketenagakerjaan menyebabkan banyak pekerja yang tidak mengetahui cara mengakses layanan JKK dengan benar. Hal ini sering kali menghambat proses pencairan manfaat, sehingga banyak pekerja yang merasa kesulitan dalam mendapatkan hak mereka.

Selain itu, aspek komunikasi dalam implementasi JKK juga menjadi faktor yang berpengaruh. Komunikasi yang tidak efektif antara perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam pelaksanaan program ini. Misalnya, ketika terjadi perubahan regulasi atau prosedur klaim, tidak semua pekerja mendapatkan informasi dengan cepat dan jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pekerja ketika mereka mengalami kecelakaan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam penyebaran informasi terkait prosedur dan manfaat JKK agar para pekerja lebih memahami hak mereka.

Dari aspek sumber daya, implementasi program JKK di PT Sukun Druck juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan administrasi. Tenaga administrasi yang terbatas sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan klaim, terutama dalam hal verifikasi dokumen dan pelaporan kasus kecelakaan kerja. Ketika jumlah klaim meningkat, sering kali terjadi

keterlambatan dalam pencairan manfaat, yang pada akhirnya dapat merugikan pekerja yang membutuhkan bantuan segera.

Struktur birokrasi dalam implementasi JKK juga menjadi faktor penentu keberhasilannya. Di PT Sukun Druck, struktur organisasi yang ada telah mendukung pelaksanaan program ini, namun masih terdapat beberapa kendala administratif yang menyebabkan proses klaim tidak selalu berjalan lancar. Proses birokrasi yang terlalu panjang atau kompleks dapat memperlambat penanganan klaim pekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan proses administrasi agar manfaat JKK dapat diterima pekerja dengan lebih cepat dan efisien.

Dari segi disposisi, perusahaan menunjukkan sikap yang cukup responsif dalam menangani kasus kecelakaan kerja. Namun, koordinasi antar unit kerja dalam menangani klaim masih perlu ditingkatkan agar proses dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, sikap dan persepsi pekerja terhadap program JKK juga berperan dalam keberhasilannya. Jika pekerja merasa bahwa prosedur klaim terlalu rumit atau manfaat yang diberikan tidak memadai, maka tingkat partisipasi dan kepercayaan terhadap program ini akan menurun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode ini, peneliti berupaya menggali lebih dalam bagaimana pengalaman pekerja dalam mengakses manfaat JKK, serta kendala yang mereka hadapi dalam proses klaim. Melalui wawancara dan observasi, peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi program ini dari perspektif pekerja dan pihak pelaksana program.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan di lapangan. Jika salah satu faktor ini tidak berjalan dengan baik, maka program yang dijalankan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana keempat faktor ini berkontribusi terhadap efektivitas implementasi JKK di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam memperbaiki sistem implementasi JKK agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya analisis yang mendalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi, diharapkan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan JKK bagi para pekerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam menerapkan kebijakan yang serupa.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program JKK di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus serta memberikan

rekomendasi yang dapat meningkatkan keberhasilan program ini. Dengan implementasi yang lebih baik, diharapkan para pekerja dapat merasakan manfaat jaminan sosial ini secara maksimal, sehingga kesejahteraan dan keselamatan mereka di tempat kerja dapat lebih terjamin.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana JKK diimplementasikan, perusahaan dapat membuat perbaikan dalam sistemnya dan memastikan bahwa pekerja mendapatkan manfaat yang mereka perlukan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga penyelenggara jaminan sosial, dalam meningkatkan kualitas layanan JKK di berbagai sektor industri. Dengan begitu, manfaat jaminan sosial ini dapat dirasakan oleh seluruh pekerja secara optimal dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara rinci implementasi Program JKK di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pelaksana program, pegawai yang mengalami kecelakaan kerja, dan pihak manajemen perusahaan.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Sukun Druck, sebuah perusahaan percetakan yang berlokasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan sektor industri manufakturnya, terutama di bidang percetakan dan rokok, pada Januari 2022 hingga Oktober 2023.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam (In-depth Interview) Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada informan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan manajemen kasus dari informan.
2. Observasi adalah mengamati kegiatan atau aktivitas informan. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan dan fakta-fakta yang bias dilihat informan berkaitan dengan pelaksanaan manajemen kasus yang dilakukan.
3. Studi Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menggali data dan informasi tertulis yang berkaitan dengan informan. Data dan informasi tertulis tersebut berupa foto, dokumen, maupun tulisan-tulisan yang diperoleh dari kegiatan observasi maupun arsip yang ada.

C. Metode Analisis Data

Proses penggunaan teknik analisis data dapat dilihat dalam penjabaran berikut ini:

1. Sebelum di lapangan pada tahap awal ini, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan mengumpulkan data awal di Percetakan Sukun Druck Kabupaten Kudus

maupun hal-hal lain. Setelah itu, peneliti menganalisis hasil data tersebut guna memperjelas fokus penelitian.

2. Selama dan Setelah di Lapangan Selama berada dilapangan, peneliti melakukan analisis data baik dari hasil wawancara mendalam, observasi, maupun studi dokumentasi kepada informan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Bila dari hasil analisis data yang diperoleh belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan kegiatan tersebut sampai pada tahap tertentu dimana peneliti merasa puas dengan data yang diperoleh. Setelah dari lapangan, peneliti melakukan analisis data dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- Mereduksi data, peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok yang penting untuk difokuskan serta mengkategorisasikannya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- Menyajikan data, setelah melakukan reduksi data, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk deskriptif, bagan, grafik, tabel, gambar, dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh, sehingga dapat menggambarkan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan.
- Penarikan kesimpulan, berdasarkan penyajian data, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian, sehingga selanjutnya dapat disusun situasi pemecahan masalah berdasarkan temuan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa PT Sukun Druck telah mengimplementasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan regulasi BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan bahwa iuran yang diperlukan dibayarkan secara rutin. Langkah ini menunjukkan bahwa PT Sukun Druck memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja. Namun, meskipun program ini telah diterapkan, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya dalam memberikan manfaat maksimal bagi pekerja yang mengalami kecelakaan.

Salah satu kendala utama dalam implementasi program JKK di PT Sukun Druck adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pekerja mengenai manfaat serta prosedur klaim JKK. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pekerja yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam program ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang

diberikan oleh perusahaan maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa pekerja bahkan mengaku tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan klaim jika mereka mengalami kecelakaan kerja. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan, mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses manfaat yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, perubahan kebijakan dalam BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi faktor yang menambah kebingungan di kalangan pekerja. Setiap tahun, BPJS Ketenagakerjaan kerap melakukan penyesuaian dalam regulasi dan prosedur klaim. Namun, informasi mengenai perubahan ini tidak selalu tersampaikan dengan baik kepada para pekerja. Kurangnya komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan dalam menyampaikan perubahan kebijakan menyebabkan beberapa pekerja masih menggunakan prosedur lama yang mungkin sudah tidak berlaku.

Dari aspek sumber daya, ditemukan bahwa tenaga administrasi yang menangani program JKK di PT Sukun Druck masih terbatas. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam pengolahan dokumen klaim, sehingga proses pencairan manfaat bagi pekerja yang mengalami kecelakaan menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Dalam beberapa kasus, pekerja harus menunggu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan santunan yang seharusnya mereka terima. Kondisi ini tentu sangat merugikan pekerja, terutama mereka yang membutuhkan biaya pengobatan segera setelah mengalami kecelakaan kerja.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola program JKK juga berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. Beberapa pekerja mengaku bahwa mereka tidak mengetahui status kepesertaan mereka secara pasti, apakah mereka sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau belum. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sistem administrasi yang harus segera diperbaiki untuk memastikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan haknya secara adil.

Dalam aspek disposisi, pihak manajemen PT Sukun Druck menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung implementasi program JKK. Manajemen perusahaan menyadari pentingnya perlindungan tenaga kerja dan berusaha memastikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan akses terhadap jaminan sosial yang mereka perlukan. Namun, meskipun memiliki komitmen yang baik, keterbatasan dalam struktur birokrasi menyebabkan koordinasi antar unit kerja dalam menangani kasus kecelakaan kerja menjadi kurang optimal.

Ketika terjadi kecelakaan kerja, proses administrasi yang harus dilalui oleh pekerja sering kali melibatkan beberapa tahap birokrasi yang cukup panjang. Misalnya, pekerja harus melaporkan kecelakaan ke atasan mereka terlebih dahulu, kemudian mengajukan laporan tertulis kepada bagian personalia sebelum akhirnya diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika salah satu tahap ini mengalami keterlambatan, maka seluruh proses klaim dapat terhambat. Selain itu,

kurangnya pemahaman dari pihak manajemen tingkat bawah mengenai prosedur klaim juga dapat memperpanjang proses yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Selain hambatan dalam birokrasi internal, hubungan antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas program JKK. Beberapa kasus menunjukkan bahwa komunikasi antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak selalu berjalan lancar, terutama dalam hal verifikasi dokumen klaim. Jika terdapat kesalahan dalam dokumen yang diajukan, maka perusahaan harus mengajukan revisi yang dapat memakan waktu lebih lama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pekerja merasa kurang percaya diri dalam mengajukan klaim karena mereka khawatir akan menghadapi kesulitan dalam proses administrasi. Beberapa dari mereka memilih untuk menanggung biaya pengobatan sendiri daripada harus menghadapi prosedur klaim yang mereka anggap rumit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antara pekerja dan pihak yang bertanggung jawab atas implementasi program JKK.

Dari hasil wawancara, ditemukan pula bahwa terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tetapi tidak langsung melaporkannya ke perusahaan. Beberapa pekerja menganggap bahwa luka ringan yang mereka alami tidak perlu dilaporkan karena mereka merasa mampu menanggung biaya pengobatan sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, cedera yang awalnya ringan dapat berkembang menjadi lebih serius jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih jelas mengenai kewajiban pekerja dalam melaporkan kecelakaan kerja, sehingga mereka dapat segera mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, PT Sukun Druck perlu melakukan beberapa perbaikan dalam implementasi program JKK. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada pekerja mengenai manfaat dan prosedur klaim JKK. Sosialisasi dapat dilakukan secara berkala, baik melalui pertemuan langsung, penyebaran informasi dalam bentuk brosur, atau melalui platform digital yang mudah diakses oleh pekerja. Dengan cara ini, pekerja dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam program JKK.

Selain itu, perusahaan juga perlu menambah jumlah tenaga administrasi yang menangani program JKK agar proses klaim dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya tenaga administrasi yang cukup, pengolahan dokumen klaim dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga pekerja yang mengalami kecelakaan dapat segera menerima manfaat yang mereka butuhkan. Peningkatan koordinasi antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi hal

yang penting untuk memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PT Sukun Druck telah berusaha mengimplementasikan program JKK sesuai dengan regulasi yang ada, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif. Dengan melakukan berbagai perbaikan dalam aspek sosialisasi, sumber daya manusia, koordinasi birokrasi, dan komunikasi antara pekerja dan pihak terkait, diharapkan implementasi program JKK di perusahaan ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja di sana.

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT Sukun Druck telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan telah memastikan bahwa seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta JKK dan iuran dibayarkan secara rutin. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan manfaat program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para pekerja. Beberapa aspek utama yang memengaruhi implementasi program ini meliputi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi perusahaan, serta struktur birokrasi yang ada di perusahaan.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi mengenai program JKK kepada para pekerja. Banyak pekerja yang masih belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam program ini, serta tidak mengetahui prosedur yang harus mereka tempuh jika mengalami kecelakaan kerja. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan banyak pekerja yang merasa ragu atau tidak percaya diri dalam mengajukan klaim, sehingga beberapa dari mereka memilih untuk menanggung sendiri biaya pengobatan yang seharusnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dari aspek komunikasi, PT Sukun Druck sebenarnya telah menyediakan kanal komunikasi melalui platform digital seperti WhatsApp untuk memberikan informasi kepada pekerja mengenai program JKK. Namun, penggunaan platform digital ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemahaman pekerja. Banyak pekerja yang kurang aktif dalam mengakses informasi melalui media digital, sehingga informasi yang disampaikan tidak selalu sampai kepada seluruh pekerja. Selain itu, komunikasi satu arah melalui pesan digital sering kali kurang memberikan pemahaman yang mendalam dibandingkan dengan sosialisasi langsung yang memungkinkan adanya interaksi dan tanya jawab.

Kurangnya pertemuan tatap muka untuk sosialisasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penyebaran informasi mengenai JKK. Meskipun perusahaan memiliki kebijakan terkait program JKK, pekerja jarang mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan

pihak manajemen atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai program ini. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan kerja, banyak pekerja yang tidak tahu harus melapor ke siapa dan bagaimana cara mengajukan klaim. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi langsung agar pekerja memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai program JKK.

Dari segi sumber daya manusia, penelitian ini menemukan bahwa jumlah tenaga administrasi yang menangani program JKK di PT Sukun Druck masih terbatas. Tenaga administrasi yang ada saat ini harus menangani berbagai aspek ketenagakerjaan lainnya, sehingga proses klaim JKK sering kali mengalami keterlambatan. Kekurangan tenaga administrasi menyebabkan pengolahan dokumen klaim menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pencairan manfaat bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka efektivitas program JKK dalam memberikan perlindungan kepada pekerja akan terganggu.

Selain keterbatasan tenaga administrasi, proses birokrasi dalam pengajuan klaim juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi JKK. Meskipun prosedur klaim sudah ditetapkan dengan jelas oleh BPJS Ketenagakerjaan, pelaksanaannya di perusahaan masih mengalami hambatan administratif. Misalnya, pekerja yang mengalami kecelakaan harus melalui beberapa tahapan pelaporan sebelum klaim dapat diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika salah satu tahapan ini mengalami keterlambatan, maka seluruh proses klaim akan ikut terhambat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem birokrasi agar proses klaim dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Pada aspek disposisi, manajemen PT Sukun Druck menunjukkan sikap yang cukup responsif dalam menangani kasus kecelakaan kerja. Pihak manajemen menyadari pentingnya perlindungan tenaga kerja dan berusaha untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan manfaat dari program JKK. Namun, meskipun perusahaan memiliki komitmen yang baik, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar unit kerja dalam menangani klaim. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pencairan manfaat bagi pekerja.

Koordinasi yang kurang efektif juga terlihat dalam hubungan antara PT Sukun Druck dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam beberapa kasus, terjadi keterlambatan dalam verifikasi dokumen klaim akibat kurangnya komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak. Jika terdapat kesalahan dalam dokumen yang diajukan, maka perusahaan harus mengajukan revisi yang dapat memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih baik antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar proses klaim dapat berjalan lebih lancar.

Dari segi struktur birokrasi, sistem yang diterapkan di PT Sukun Druck sudah cukup jelas dalam hal prosedur pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih

terdapat beberapa hambatan administratif yang menyebabkan proses klaim tidak selalu berjalan dengan lancar. Misalnya, persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pekerja terkadang membingungkan, sehingga mereka harus bolak-balik untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian klaim menjadi lebih lama dari yang seharusnya.

Selain itu, faktor kesadaran pekerja dalam melaporkan kecelakaan kerja juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi program JKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pekerja enggan melaporkan kecelakaan kerja yang mereka alami karena menganggap cedera yang mereka alami tidak terlalu serius. Namun, dalam beberapa kasus, cedera ringan yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi lebih parah di kemudian hari. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan edukasi kepada pekerja mengenai pentingnya melaporkan setiap kecelakaan kerja, sekecil apa pun, agar mereka dapat segera mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun PT Sukun Druck telah mengimplementasikan program JKK sesuai dengan prosedur yang ada, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif. Perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi kepada pekerja mengenai manfaat dan prosedur klaim JKK, menambah jumlah tenaga administrasi yang menangani program ini, serta memperbaiki koordinasi antar unit kerja agar proses klaim dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya perbaikan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, diharapkan program JKK di PT Sukun Druck dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh pekerja.

KESIMPULAN

A. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan telah memastikan bahwa seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta JKK dan membayar iuran secara rutin. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan manfaat dari program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para pekerja. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi mengenai program JKK kepada pekerja. Banyak pekerja yang masih belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam program ini, termasuk prosedur klaim yang harus mereka lalui ketika mengalami kecelakaan kerja. Kurangnya informasi ini menyebabkan beberapa pekerja tidak mengajukan klaim meskipun mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat JKK.

- B. Selain masalah sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani program JKK di perusahaan juga menjadi hambatan dalam implementasinya. Tenaga administrasi yang terbatas membuat proses klaim sering kali mengalami keterlambatan karena dokumen yang diajukan harus melewati beberapa tahap verifikasi sebelum dapat diproses lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, pekerja harus menunggu dalam waktu yang lebih lama untuk menerima manfaat yang seharusnya segera mereka dapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan jumlah tenaga administrasi atau mengoptimalkan sistem administrasi agar proses klaim dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya peningkatan dalam aspek sumber daya manusia, diharapkan pelayanan JKK dapat berjalan lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja.
- C. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi program JKK, perusahaan perlu melakukan berbagai upaya perbaikan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan sosialisasi kepada pekerja mengenai manfaat dan prosedur klaim JKK. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan langsung, penyebaran informasi melalui brosur atau papan pengumuman, serta penggunaan media digital yang lebih interaktif. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengadakan sesi edukasi rutin bagi para pekerja agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam program ini. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap program JKK akan meningkat, sehingga mereka dapat memanfaatkan program ini secara optimal.
- Terakhir, peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam menangani kasus kecelakaan kerja juga sangat diperlukan. Kurangnya koordinasi antara bagian personalia, bagian produksi, dan pihak manajemen sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan klaim. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun sistem yang lebih terstruktur dan memastikan bahwa setiap unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menangani kasus kecelakaan kerja. Selain itu, perlu adanya hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar proses klaim dapat berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. Dengan adanya peningkatan dalam aspek sosialisasi, sumber daya manusia, serta koordinasi internal dan eksternal, diharapkan program JKK di PT Sukun Druck dapat berjalan dengan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi pekerja yang membutuhkan perlindungan sosial dari risiko kecelakaan kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah turut berperan membantu penulis, antara lain kepada bapak Suharma, S. Sos., MP., Ph. D, selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph,

D, selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung bapak Suharma, S.Sos., MP., Ph.D, dan Dr. Helly Ocktilia, MP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyusun skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. 2012. Pengantar kesejahteraan Sosial Bandung: Refika Aditama
- Edi Suharto. 2009. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR. Bandung: Alfabeta
- Eka Putri, A (2014) Paham BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) (1 Spetember 2014). CV Komunitas Pejaten Mediatama.
- Eka Putri, A. (n.d). Paham BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Eka Putri, A. (2004). UU No.40 Pasal 1 Angka 6. Jakarta.
- H. Manulang, S. (2001). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Rhineka Cipta.
- Usman, N (2002). Impelmentasi Para Ahli
<https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022>
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- <https://www.pelatihank3.co.id/informasi/grafik-kecelakaan-kerja-diindonesia-5-tahun-terakhir.html>
- <https://api.repository.poltekesos.ac.id/server/api/core/bitstreams/f95e43ac-0963-494a-86e3-f48a63448151/content>Khakim, A, (2009). Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Liberty.
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta
- Moh. Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, J. L. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nuraida, Ida. 2008. Manajemen Administrasi Perkantoran. Kanisius
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program
- Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- Purwanto, Erwan dkk, 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta. Gava media
- Usman, N (2002). Impelmentasi Para Ahli. Sulastomo. (2008a). Sistem Jaminan Sosial Nasional. Rajawali Pers.
- Setiawan, G (2004). Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka.
- Subarsono.2012, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi_ Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono.2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. Suharto, Edi.2009,2010. Pekerjaan Sosial diDunia Industri, Bandung. Alfabeta
- Sugiyono.2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sukoco, Dwi Heru. 1998. Profesi Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya. Kopma STKS Bandung. Bandung.

Sulastomo. (2008b). Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. PT. Raja Grafindo

Sumarni, M. (2014). Pengantar Bisnis dasar – dasar Ekonomi Perusahaan.

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial